

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
MASYARAKAT: STUDI KASUS PKK DI KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KOTA
TANGERANG**

Fitri Aulia¹, Ahmad Chumaedy², Tito Inneka Widyawati³, Toddy Aditya⁴, Nurhakim⁵
¹²⁴⁵ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Tangerang
³ Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Yuppentek Indonesia
Email : fitriauliaaulia43@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Poris Plawad Indah, Kota Tangerang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PKK telah berjalan melalui koordinasi dan komunikasi rutin, namun masih menghadapi kendala pada aspek penyebaran informasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kader, penguatan komunikasi, dan sinergi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: komunikasi implementasi program, evaluasi, pemberdayaan masyarakat, PKK

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Family Empowerment and Welfare Program (PKK) in Poris Plawad Indah Village, Tangerang City. The study used a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model. The results indicate that the PKK program has been implemented through routine coordination and communication, but still faces obstacles in information dissemination, limited resources, low community participation, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, capacity building of cadres, strengthening of communication, and synergy between institutions are needed to increase the effectiveness of the community empowerment program.

Keywords: program implementation communication, evaluation, community empowerment, PKK

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi lokal dan partisipasi aktif warga. Dalam konteks kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai strategi penting untuk mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas program pemberdayaan sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan di tingkat lokal, khususnya pada

unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, yaitu kelurahan. (Setiawati, Ramli, and Khairiah 2025) Di tingkat kelurahan, implementasi program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kelembagaan masyarakat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan berbasis keluarga adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan gerakan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pelaksanaan sepuluh program pokok yang mencakup aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Keberadaan PKK diharapkan mampu menjadi sarana pengorganisasian

masyarakat, khususnya perempuan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan. Fenomena yang sering dijumpai adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKK. (Aziz and Isnawati 2022) Partisipasi yang terjadi cenderung bersifat terbatas pada pengurus inti, sementara sebagian besar anggota dan masyarakat belum terlibat secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PKK masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menempatkan warga sebagai subjek pembangunan. Selain rendahnya partisipasi, permasalahan lain yang muncul adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan PKK dalam menjalankan fungsi pemberdayaan. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan teknis, serta keterbatasan anggaran dan sarana prasarana menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Dalam banyak kasus, program PKK masih sangat bergantung pada dukungan dana pemerintah kelurahan, sehingga ruang inovasi dan keberlanjutan program menjadi terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan PKK dalam menghasilkan program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kemandirian keluarga dan masyarakat.

Permasalahan implementasi program PKK juga diperkuat oleh lemahnya koordinasi dan sinergi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, serta RT/RW. Program pemberdayaan sering kali dilaksanakan secara parsial dan tidak terintegrasi, sehingga potensi kolaborasi antarlembaga belum dimanfaatkan secara optimal. Lemahnya sinergi ini berimplikasi pada tumpang tindih kegiatan, inefisiensi penggunaan sumber daya, serta rendahnya dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. (Rahmawati, Sujana, and Rantau 2024)

Sejumlah penelitian terdahulu telah menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di

tingkat lokal. (Putri, Sekarningrum, and Fedryansyah 2022) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada penguatan kapasitas dan kesadaran kritis warga, bukan sekadar pendekatan bantuan. (Utami 2025) menekankan pentingnya peran kelembagaan lokal dalam mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. (Noorikhshan et al. 2023) mengungkapkan bahwa evaluasi implementasi kebijakan diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan administratif yang memengaruhi kinerja program pemberdayaan. Selanjutnya, (Rai and Author 2023) menemukan bahwa dukungan anggaran yang memadai tidak akan efektif tanpa diiringi dengan kapasitas perencanaan dan koordinasi kelembagaan yang baik. (Irawan 2025) juga menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas administrasi dan belum adanya standar operasional prosedur yang jelas menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat kelurahan. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga dengan proses implementasi dan efektivitas kelembagaan pelaksana program.

Meskipun berbagai studi telah membahas implementasi dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat, kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi program pemberdayaan kelembagaan masyarakat PKK di tingkat kelurahan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada capaian hasil atau dampak program, sementara aspek proses implementasi, peran PKK sebagai aktor pelaksana, serta faktor pendukung dan penghambat dari sisi kelembagaan belum banyak dianalisis secara mendalam. Padahal, pemahaman terhadap proses implementasi menjadi kunci untuk menjelaskan efektivitas program pemberdayaan. (Putra, Isu, and Mei 2024)

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program pemberdayaan kelembagaan masyarakat PKK di Kelurahan Poris Plawad Indah, Kota

Tangerang, Banten. (Aprilia, Humaedi, and Darwis 2025) Penelitian ini memfokuskan kajian pada proses pelaksanaan program, peran dan kapasitas PKK sebagai lembaga pelaksana, tingkat partisipasi masyarakat, serta sinergi antarlembaga kemasyarakatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat, serta menjadi bahan rekomendasi praktis bagi pemerintah kelurahan dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan berbasis kelembagaan. (Rahmawati et al. 2024)

LITERATURE REVIEW

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan atau program pada dasarnya merupakan tahap krusial setelah perumusan kebijakan, karena pada fase inilah tujuan yang telah dirancang diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. (Norza 2025) implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan eksekutif. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan desain awal dan kondisi lapangan yang dihadapi. Implementasi program pembangunan, termasuk program pemberdayaan kelembagaan masyarakat, tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut interaksi sosial antara pelaksana kebijakan dan masyarakat sasaran. Pressman dan Wildavsky menekankan bahwa implementasi merupakan rangkaian proses yang kompleks dan melibatkan banyak aktor, sehingga sering kali terjadi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan kelembagaan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan program (Aprilia et al. 2025).

Model implementasi kebijakan yang banyak digunakan adalah model George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Revani, Bunga, and Rohimah 2025) Komunikasi berperan penting dalam memastikan bahwa tujuan dan mekanisme program dipahami secara jelas oleh para pelaksana dan masyarakat. Ketidaktepatan komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan program, sehingga menghambat pencapaian tujuan. Sumber daya merupakan faktor penting lainnya dalam implementasi program. Sumber daya tidak hanya mencakup dana, tetapi juga sumber daya manusia, informasi, serta sarana dan prasarana pendukung. Dalam konteks pemberdayaan kelembagaan masyarakat, keterbatasan sumber daya sering menjadi kendala utama, terutama pada tingkat kelurahan yang memiliki kapasitas anggaran dan personel yang terbatas (Yopi 2024).

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan turut menentukan keberhasilan implementasi. Komitmen, kejujuran, dan pemahaman pelaksana terhadap tujuan program akan memengaruhi kualitas pelaksanaan di lapangan. Apabila pelaksana memiliki sikap yang positif dan mendukung program, maka implementasi cenderung berjalan lebih efektif. Sebaliknya, sikap apatis atau resistensi dapat menyebabkan program tidak berjalan optimal. (Aprilia et al. 2025) Struktur birokrasi juga memengaruhi implementasi program pemberdayaan. Struktur organisasi yang terlalu kaku dan berbelit-belit dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks pemerintahan daerah, koordinasi antarinstitusi dan kejelasan pembagian tugas menjadi faktor penting agar implementasi program pemberdayaan kelembagaan masyarakat dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan (Saskia et al. 2025).

Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardikanto, T. & Soebiato, P. (2019). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta.

evaluasi kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, khususnya terkait efektivitas, efisiensi, dan dampaknya. Evaluasi menjadi alat penting bagi pengambil kebijakan untuk menentukan keberlanjutan, perbaikan, atau penghentian suatu program. Dalam konteks program pemberdayaan kelembagaan masyarakat, evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pelaksanaan program. Evaluasi proses bertujuan untuk menilai bagaimana program dijalankan, apakah sesuai dengan perencanaan, serta kendala apa saja yang dihadapi selama implementasi. Hal ini penting karena keberhasilan hasil sering kali dipengaruhi oleh kualitas proses pelaksanaan (Ahmadi 2025).

Pendekatan evaluasi program dapat dilakukan dengan berbagai model, salah satunya adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini menilai program secara komprehensif mulai dari konteks kebutuhan masyarakat, input sumber daya, proses pelaksanaan, hingga produk atau hasil yang dicapai. Model CIPP sering digunakan dalam evaluasi program pembangunan karena mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja program. Evaluasi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi pelaksana program dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui evaluasi, dapat diidentifikasi praktik-praktik terbaik (best practices) maupun kelemahan yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat penilaian, tetapi juga menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program pemberdayaan (Norza 2025).

Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi menjadi aspek penting, terutama dalam program berbasis pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program, sehingga hasil evaluasi lebih dapat diterima dan ditindaklanjuti. Evaluasi yang efektif membutuhkan indikator kinerja yang jelas

dan terukur. Indikator tersebut dapat mencakup aspek kelembagaan, kapasitas masyarakat, keberlanjutan program, serta dampak sosial dan ekonomi. Tanpa indikator yang jelas, evaluasi cenderung bersifat subjektif dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan di tingkat pemerintah daerah (Rahmawati et al. 2024).

Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Menurut Chambers, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu menentukan pilihan dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan. Konsep ini menekankan pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari penguatan kelembagaan lokal. Kelembagaan masyarakat, seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan kelompok swadaya masyarakat, berperan sebagai wadah partisipasi dan pengorganisasian masyarakat. Melalui kelembagaan yang kuat, masyarakat dapat lebih efektif dalam menyuarakan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan di tingkat local (Aprilia et al. 2025).

Proses pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa tahapan, antara lain penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap penyadaran bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi. Tahap pengkapasitasan berfokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan, sedangkan tahap pendayaan menekankan pada pemberian akses dan peluang agar masyarakat dapat berperan aktif secara mandiri. Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pemberdayaan. Menurut Arnstein, partisipasi yang bermakna terjadi ketika masyarakat memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar dilibatkan secara simbolis. Dalam program pemberdayaan kelembagaan masyarakat, tingkat

partisipasi menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan program tersebut (Yopi 2024).

Pemberdayaan masyarakat juga berkaitan erat dengan keberlanjutan pembangunan. Program yang berhasil memberdayakan masyarakat akan menciptakan kemandirian, sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Kelembagaan masyarakat yang kuat mampu menjaga keberlanjutan program melalui pengelolaan sumber daya lokal dan kerja sama antaranggota masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan berbasis lokal. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendamping, bukan sebagai aktor dominan. Dengan demikian, pemberdayaan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan, seperti di Kelurahan Poris Plawad Indah Kota Tangerang, diharapkan mampu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Saskia et al. 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi program pemberdayaan kelembagaan masyarakat PKK di tingkat kelurahan, khususnya terkait peran PKK sebagai aktor pelaksana, tingkat partisipasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Poris Plawad Indah, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kelurahan Poris Plawad Indah secara aktif melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan PKK dengan fokus pada pemberdayaan keluarga dan perempuan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap program PKK. Informan meliputi

aparatur kelurahan yang membidangi pemberdayaan masyarakat, ketua dan pengurus PKK, perwakilan lembaga kemasyarakatan (LPM dan RT/RW), serta anggota PKK dan masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai proses pelaksanaan program PKK, peran dan koordinasi antaraktor, tingkat partisipasi masyarakat, serta kendala dalam implementasi program. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas PKK dan pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat kelurahan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi seperti program kerja PKK, laporan kegiatan, notulen rapat, serta arsip kelurahan yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dari berbagai sumber dianalisis secara berkesinambungan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan implementasi program pemberdayaan kelembagaan masyarakat PKK. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta membandingkan informasi antar-informan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam Implementasi Program PKK

Komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi program pemberdayaan kelembagaan masyarakat PKK di Kelurahan Poris Plawad Indah. Berdasarkan hasil penelitian, penyampaian informasi terkait program PKK umumnya dilakukan melalui rapat rutin bulanan, pertemuan kader, serta koordinasi dengan ketua RT dan RW. (Septiansyah, Jenderal, and Yani 2025)

Mekanisme komunikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan dapat diketahui oleh pengurus dan anggota PKK di tingkat lingkungan. Selain itu, pihak kelurahan juga memberikan arahan kepada pengurus PKK melalui forum koordinasi sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Namun demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi beberapa kendala. Informasi yang disampaikan sering kali hanya beredar di kalangan pengurus inti, sementara sebagian anggota dan masyarakat belum memperoleh informasi secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat program PKK masih relatif rendah. Akibatnya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan belum optimal karena mereka tidak sepenuhnya memahami peran dan kontribusi yang dapat diberikan (Chawa et al. 2024).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan, manfaat, maupun bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK. Sebagian masyarakat menyampaikan bahwa informasi yang diterima hanya sebatas pemberitahuan mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan tanpa penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan ruang partisipasi masyarakat dalam program tersebut. (Tauran, Rahman, and Latip 2025)

Selain keterbatasan jangkauan informasi, metode komunikasi yang digunakan masih bersifat konvensional dan kurang variatif. Penyampaian informasi masih mengandalkan pertemuan tatap muka dan pemberitahuan melalui struktur organisasi, sehingga masyarakat yang tidak hadir dalam pertemuan sering kali tidak mendapatkan informasi terbaru. Pemanfaatan media digital seperti grup pesan instan atau media sosial belum dilakukan secara maksimal sebagai sarana komunikasi yang lebih efektif dan cepat. Dalam Wawancara dengan Sekertaris kelurahan Taufik, S.Kom Beliau menjelaskan;

"Komunikasi dengan PKK dilakukan melalui rapat koordinasi dan pertemuan rutin. Setiap ada program dari pemerintah daerah atau kecamatan, kami segera menyampaikan kepada pengurus PKK agar dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada masyarakat".

Dari sisi koordinasi internal, komunikasi antar pengurus PKK relatif berjalan dengan baik. Setiap pokja memiliki pembagian tugas yang jelas dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, komunikasi lintas lembaga, seperti dengan LPM, Karang Taruna, dan organisasi masyarakat lainnya, masih belum terbangun secara sistematis. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya integrasi kegiatan (Sari et al. 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat baru mengetahui keberadaan kegiatan ketika program akan dilaksanakan atau bahkan setelah kegiatan selesai dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses komunikasi masih bersifat **top-down**, yaitu informasi lebih banyak bergerak dari pelaksana kepada masyarakat tanpa adanya ruang dialog yang cukup untuk menyerap kebutuhan, masukan, dan aspirasi warga. (Chawa et al. 2024)

Dalam wawancara dengan Ibu Maesaroh Salah satu warga menyampaikan:

"Kadang informasi kegiatan baru disampaikan satu atau dua hari sebelum acara berlangsung. Kalau ada kegiatan lain atau pekerjaan, jadi sulit untuk ikut."

Pernyataan informan menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi program PKK adalah keterbatasan waktu penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan dalam waktu yang terlalu dekat dengan pelaksanaan kegiatan menyebabkan masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan jadwal dan mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Akibatnya, tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan PKK menjadi kurang optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi masih memerlukan perbaikan agar tujuan

pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. PKK perlu menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif, seperti menyampaikan informasi jauh hari sebelum kegiatan dilaksanakan serta memanfaatkan berbagai media komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan akan semakin besar dan tujuan program dapat tercapai dengan lebih baik.

Situasi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam tahapan implementasi program. Masyarakat cenderung hadir hanya sebagai peserta kegiatan dan belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan, penyusunan agenda kegiatan, maupun evaluasi hasil program. Padahal, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat sejak tahap awal merupakan faktor penting untuk membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program yang dijalankan.

"Terkait komunikasi dengan masyarakat, PKK menggunakan berbagai saluran, seperti penyampaian langsung melalui kader di tingkat RT, kegiatan rutin (posyandu, arisan), serta media komunikasi digital. Secara umum, masyarakat dinilai cukup mudah dalam mengakses informasi terkait program PKK. Akan tetapi, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang aktif sehingga informasi tidak sepenuhnya tersampaikan secara merata."

Dalam wawancara dengan ketua PKK ibu Wiwit menjelaskan:

"Setiap ada program atau kegiatan baru, kami selalu menyampaikan informasi melalui rapat bulanan dan grup WhatsApp. Kami juga meminta bantuan kader dan RT/RW untuk meneruskan informasi kepada masyarakat agar semua warga dapat mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PKK telah menggunakan berbagai saluran komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain komunikasi tatap muka melalui rapat bulanan, PKK juga memanfaatkan media digital berupa grup WhatsApp sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih

cepat dan mudah dijangkau. Keterlibatan RT/RW dan kader PKK juga menunjukkan adanya kerja sama dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Meskipun berbagai media komunikasi telah digunakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh informasi secara merata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas komunikasi masih perlu ditingkatkan. Penyampaian informasi sebaiknya dilakukan lebih awal dan menggunakan media yang lebih beragam agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penyampaian informasi di tingkat struktural dan penerimaan informasi di tingkat masyarakat. Dalam perspektif implementasi kebijakan, komunikasi yang kurang efektif dapat menyebabkan distorsi informasi dan menghambat pencapaian tujuan program. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas program pemberdayaan PKK. Secara keseluruhan, komunikasi dalam implementasi program PKK di Kelurahan poris plawad indah telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan memanfaatkan teknologi informasi agar masyarakat dapat memahami program secara lebih baik dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan (Salsabila et al. 2025)

Dalam wawancara dengan Kader PKK ibu siti menjelaskan:

"Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam koordinasi antar lembaga, di antaranya adalah kesulitan dalam menyelaraskan waktu karena kesibukan masing-masing pihak, serta adanya perbedaan pandangan yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal."

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan beberapa upaya perbaikan, yaitu

peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, penggunaan media komunikasi yang lebih beragam, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan program, serta penguatan forum komunikasi antara PKK, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Dengan demikian, implementasi program pemberdayaan tidak hanya berjalan secara administratif tetapi juga mampu membangun partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. (Praja, Rumbekwan, and Muhammad Ibrahim 2020)

Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program

Sumber daya merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi program pemberdayaan kelembagaan PKK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki PKK di Kelurahan Cipondoh cukup memadai dari segi jumlah, karena setiap wilayah memiliki kader yang aktif. Para kader umumnya memiliki komitmen dan kepedulian terhadap kegiatan sosial, khususnya dalam bidang kesehatan keluarga, pendidikan, dan kegiatan ekonomi rumah tangga. Meskipun demikian, dari sisi kapasitas, sebagian kader masih membutuhkan peningkatan kompetensi. Pelatihan teknis yang diberikan kepada kader masih terbatas dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Akibatnya, kemampuan kader dalam merancang program inovatif dan mengelola kegiatan pemberdayaan secara mandiri masih belum optimal. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan program yang cenderung mengikuti pola kegiatan rutin tanpa adanya pengembangan yang signifikan (Tauran et al., 2025).

Dari aspek sumber daya finansial, program PKK masih sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah kelurahan dan bantuan dari pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan biaya operasional lebih besar, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha keluarga, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi. Minimnya sumber pendanaan alternatif juga menyebabkan ruang inovasi program menjadi terbatas. Selain itu, sarana dan

prasarana pendukung kegiatan masih belum sepenuhnya memadai. Beberapa kegiatan PKK masih dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas umum secara terbatas. Keterbatasan tempat, alat, dan bahan pendukung menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Aziz & Isnawati, 2022).

Keterbatasan sumber daya juga terlihat pada aspek informasi dan data. PKK belum memiliki sistem pendataan yang terstruktur dan terbaru secara berkala terkait kondisi sosial ekonomi keluarga. Padahal, data tersebut sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya dalam implementasi program PKK masih perlu diperkuat, baik dari sisi kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, maupun sarana prasarana. Penguatan sumber daya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan secara berkelanjutan (Setiawati et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat melalui PKK di Kelurahan Poris Plawad Indah Kota Tangerang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dan menunjukkan upaya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga, namun efektivitas implementasinya masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa aspek implementasi yang masih menghadapi kendala.

Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi program telah dilakukan melalui koordinasi internal dan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi belum sepenuhnya mampu membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Dari aspek sumber daya, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta sarana pendukung masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Dari aspek disposisi,

pengurus PKK menunjukkan komitmen dalam menjalankan kegiatan, meskipun pelaksanaan masih didominasi oleh kelompok pengurus inti. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi dan koordinasi kelembagaan, sinergi antara PKK dengan lembaga masyarakat lainnya belum berjalan secara maksimal sehingga pelaksanaan program belum sepenuhnya terintegrasi.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam program masih cenderung terbatas pada keterlibatan dalam kegiatan pelaksanaan dan belum banyak melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan maupun evaluasi program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasi masyarakat, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, peningkatan efektivitas implementasi program PKK perlu diarahkan pada pengembangan sistem pemberdayaan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan agar tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Muhammad Didi. 2025. "Peningkatan Keterampilan Komunikasi Pelayanan Publik Bagi Tenaga Kesehatan." *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2(4):280–306.
- Aprilia, Marwah Dwita, Sahadi Humaedi, and Rudi Saprudin Darwis. 2025. "EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PADA PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DENGAN KOMUNITAS." *SHARE SOCIAL WORK JOURNAL* 15(1):48–58.
- Aziz, Abdul, and Setya Indah Isnawati. 2022. "Development of Creativity in Liquid Soap Production in PKK Tembalang District : Analysis and Evaluation." 1(1):188–92.
- Chawa, Anif Fatma, Moch Hisyam Putra, Ucca Arawindha, and Dewi Puspita Rahayu. 2024. "Designing a Safe and Friendly Environment for Women and Children in Rural Community." 12(01):102–20.
- Irawan, Rahmat Edi. 2025. "Framing Analysis of Ferry Irwandi ' s YouTube Content on the Mastermind of the Riots and the Discourse of Martial Law." 11(02).
- Noorikhshan, Faisal Fadilla, Hilal Ramadhani, Budi Chrismanto Sirait, Nisa Khoerunisa, and Kata Kunci. 2023. "Journal of Political Issues Dinamika Internet , Media Sosial , Dan Politik Di Era Kontemporer : Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat." *Journal of Political Issues* 5(1):1–14.
- Norza, Agil Kurniawan. 2025. "Efektivitas Program Nabuang Sarok Dalam Pengurangan Timbulan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kota Solok." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora Vol: 5(2):1–11.*
- Praja, Selvia Junita, Margaretha Rumbekwan, and Muhammad Ibrahim. 2020. "Evaluasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur." 10(1):266–79.
- Putra, Audra, Pada Isu, and Kerusuhan Mei. 2024. "KOMUNIKASI DALAM VIDEO PANDJI DJUANDA." 7(May 1998):18875–82.
- Putri, Tesa Amyata, Bintarsih Sekarningrum, and Muhammad Fedryansyah. 2022. "Gerakan Sosial Dan Mobilisasi Sumber Daya Dalam Memperjuangkan Pengakuan Kepercayaan Berbeda." 9:22–31.
- Rahmawati, Marcella, Nanan Sujana, and Muhammad Ibrahim Rantau. 2024. "Implementasi Program Gotong Royong Cegah Stunting (Goceng) Di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4(2):1–11.
- Rai, Universitas Ngurah, and Corresponding Author. 2023. "Implementation of Urban Village Fund Policy for Infrastructure Development and Community Empowerment in Karangasem Urban Village 1,2,3)." 351

- 4(3):1463–72.
- Revani, Claudia, Lutfi Bunga, and Salsa Rohimah. 2025. "Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Aktivisme Mahasiswa." 9:2702–6.
- Salsabila, Risa Irvani, Hepy Tri Winarti, Program Studi, Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan, Dan Ilmu, and Universitas Mulawarman. 2025. "WOMEN EMPOWERMENT THROUGH FAMILY WELFARE EMPOWERMENT COMMUNITY (PKK) IN JAWA SAMARINDA ULU VILLAGE." 14(2252):243–47.
- Sari, Nurmala, Ernita Puspa Dewi, Hannisa Fitri Effendi, and Ramadhan Fathur. 2025. "Improving the Quality of Dasawisma Administration through Collaboration with Universities." (April).
- Saskia, Anggy, Ade Budi Setiawan, Saepul Anwar, Dana Kelurahan, and Kecamatan Cibodas. 2025. "Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Good Governance Pada Dana Kelurahan Di Tingkat Kecamatan." *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 5(1):117–30.
- Septiansyah, Bayu, Universitas Jenderal, and Achmad Yani. 2025. "Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Rukun Warga Di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi Bayu Septiansyah 1*." 8090:223–37. doi: 10.22219/jurnalsospol.v11i2.39972.
- Setiawati, Efni Ramli, and Khairiah. 2025. "Pengembangan Kelompok PKK Sebagai Agen Penggerak Ketahanan Pangan Keluarga Di Desa Petani." 4(4):1523–29.
- Tauran, T., Abdul Rahman, and Abdul Latip. 2025. "A Place-Based Approach to Urban Policy : Reflections from the Prodama Program in Kediri , Indonesia." 9(148):320–41. doi: 10.26740/jsm.v9n1.p320-341.
- Utami, Wahyu Kartiko. 2025. "Analisis Gerakan Politik Hijau WALHI Melalui Media Sosial Instagram Dalam Mewujudkan Kesadaran Lingkungan." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan* 2(1):160–69.
- Yopi, Kiring. 2024. "Evaluasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Peningkatan Teknologi Tepat Guna Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(12):8971–94. doi: 10.47467/alkharaj.v6i12.5862.